

PIDATO GUBERNUR  
DALAM RANGKA PEMBUKAAN  
DIALOG HUTAN TENTANG PANGAN, BAHAN BAKAR, SERAT DAN HUTAN  
THE FOREST DIALOGUE - Food, Fuel, Fiber and Forests (4Fs)  
Palangka Raya, 18 Maret 2013

Yth. Director General Center for International Forestry Research (CIFOR)  
Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Yth. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
Yth. Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah  
Yth. The Forest Dialogue Steering Committee  
Yth. The Forest Dialogue Organizing Committee  
Yth. Seluruh peserta The Forest Dialogue dari berbagai negara dan organisasi  
Hadirin dan undangan yang saya hormati,

Ass. Ws. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian!

Pertama-tama saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk memanjat puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena berkat kasih kemurahanNya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan “Dialog Hutan tentang Pangan, Bahan Bakar, Serat dan Hutan” atau The Forest Dialogue on 4Fs (Food, Fuel, Fiber and Forest). Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan Selamat Datang di Kalimantan Tengah – Huma Betang – Bumi Tambun Bungai - Bumi Pancasila.

Hadirin yang saya hormati,

Saya memahami bahwa “Dialog Hutan” ini bertujuan untuk:

- menjembatani diskusi mengenai penggunaan lahan antara sektor kehutanan dan pertanian, khususnya kelapa sawit, pada skala besar hingga kecil, dan skala lokal hingga internasional;
- membangun pemahaman dan inovasi untuk menghadapi tantangan penggunaan lahan dan air, intensifikasi bidang kehutanan dan pertanian

seraya melindungi nilai dan fungsi hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin berkembang;

- Menentukan langkah-langkah khusus dan praktis terkait dengan isu-isu kunci yang akan dilakukan oleh para pihak di Indonesia dan internasional.

Saya juga sudah mendengar bahwa para peserta telah melakukan Kunjungan Lapangan ke Desa Buntoi dan sekitarnya, serta salah satu perusahaan perkebunan besar di Desa Pundu selama dua hari yang lalu. Saya yakin para peserta telah mendapat gambaran singkat tentang bagaimana para pihak di Kalimantan Tengah memanfaatkan dan menggunakan lahan untuk berbagai kepentingan.

Hadirin yang saya hormati,

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas kurang lebih 15,3 juta hektar. Di dalam pemanfaatan kawasan, Pemerintah Provinsi telah menggunakan Rencana Tata Ruang Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 dimana kawasan hutan dialokasikan seluas 8,4 juta hektar (55%) dan kawasan non hutan 6,9 juta hektar (45%). Namun perkembangan berikutnya, penetapan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.529 tahun 2012 mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (82%) dan kawasan non hutan seluas 2,7 juta hektar (18%). Dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang mengupaya pengesahan RTRWP yang baru yang disesuaikan dengan penunjukkan kawasan hutan yang baru.

Pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan oleh para pihak di Kalimantan Tengah adalah untuk pengembangan izin usaha kehutanan seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) sebanyak 61 unit seluas 4,2 juta hektar; IUPHHK-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sebanyak 23 unit seluas 0,6 juta hektar; dan IUPHHK-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) sebanyak 2 unit seluas 188 ribu hektar. Pemanfaatan kawasan hutan lainnya adalah untuk izin usaha perkebunan dan pertambangan.

Dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk sektor pertanian atau perkebunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di dalam memberikan izin usaha perkebunan tidak hanya mempertimbangkan aspek

ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Untuk mengimplementasikan komitmen pembangunan perkebunan berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan. Di dalam Perda tersebut diatur antara lain pemberian izin usaha perkebunan, upaya perlindungan terhadap lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan.

Hadirin yang saya hormati,

Perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha berskala besar baik di sektor kehutanan atau pertanian/ perkebunan, namun juga kepada pelaku usaha skala kecil yaitu petani/pekebun.

Di sektor perkebunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengupayakan program Revitalisasi Perkebunan Rakyat terutama untuk kelapa sawit dan karet. Melalui Perda Nomor 5 tahun 2011, perkebunan besar swasta telah diwajibkan untuk membangun perkebunan untuk rakyat di sekitar kebun seluas 20% dari luas izin usahanya. Program ini terus berjalan, walaupun di lapangan masih menghadapi berbagai kendala terutama tentang ketersediaan lahan.

Di sektor kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Di Kalimantan Tengah telah difasilitasi pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD). Kemarin para peserta telah mengunjungi Desa Buntoi sebagai salah satu desa yang telah memperoleh izin pengelolaan Hutan Desa. Saya berharap para peserta mendapat gambaran tentang bagaimana masyarakat desa mulai belajar memanfaatkan kesempatan mengelola hutan dengan mandiri.

Kebijakan lain yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah memberikan ruang dalam pemenuhan hak-hak masyarakat adat dengan kearifan lokalnya untuk bisa memiliki akses dan andil yang lebih besar dalam pengelolaan sumberdaya alam. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk PERDA No 1 Tahun

2010 tentang Kelembagaan Adat; dan PERGUB No 4 tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam kaitannya dengan “Pangan” di dalam Dialog Hutan ini, ingin saya sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengembangkan Program Kalteng Besuh (Kalteng Kenyang). Program ini ingin memastikan bahwa Kalimantan Tengah harus mampu secara mandiri dan berdaulat membangun ketahanan pangannya. Mengingat kekayaan sumberdaya alam Kalimantan Tengah yang sangat kaya baik dari dalam hutan, lahan dan perairannya maka Program Kalteng Besuh ini diarahkan untuk pemenuhan akan pangan baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perikanan.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan paparan singkat saya di atas tentang pemanfaatan hutan dan lahan, saya mengharap melalui Dialog Hutan ini akan diperoleh isu-isu kunci dan opsi langkah praktis yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di dalam memformulasi kebijakan-kebijakan di dalam penggunaan lahan.

Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dari CIFOR dan The Forest Dialogue untuk melaksanakan kegiatan yang baik ini di Kota Palangka Raya.

Akhirnya, dengan memohon restu kepada Tuhan Yang Makakuasa, saya nyatakan “Dialog Hutan tentang Pangan, Bahan Bakar, Serat dan Hutan” yang diselenggarakan di Palangka Raya, dibuka dan dimulai secara resmi.

Selamat melaksanakan dialog.

Sekian dan terimakasih.

Ws.Wr.Wb

Palangka Raya, 18 Maret 2014  
Gubernur Kalimantan Tengah

Agustin Teras Narang